



---

## **Perubahan Pendekatan Amerika Serikat Terhadap *One China Policy* Di Era Presiden Donald Trump**

Yolanda Shafna Kirana<sup>\*1</sup>, Moh. Nizar<sup>2</sup>, Luerdi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>The Student of International Relations Study, <sup>2,3</sup>Lecturer of International Relations Study

\*Corresponding author: International Relations Study Program, University of Lampung.

Email: yolandashaf.10gmail.com

---

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan yang terjadi terhadap pendekatan Amerika Serikat terhadap One China Policy yang awalnya menggunakan strategi engagement menjadi containment. One China Policy telah menjadi pilar utama dalam terbentuknya kerja sama antara Amerika Serikat dan Cina sejak dekade 1970-an. Namun, kebijakan ini mengalami pergeseran pendekatan setelah Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat. Hal ini memunculkan gap penelitian tentang mengapa terjadi perubahan pendekatan di era Donald Trump. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif dengan pendekatan kualitatif untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut dan melihat bentuk perubahannya. Penulis juga menggunakan teori neoclassical realisme sebagai teori untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan. Data diperoleh melalui analisis dokumen resmi, pernyataan kebijakan yang berkaitan dengan perubahan pendekatan, dan juga dari portal-portal berita terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan strategi pendekatan Amerika Serikat yang tadinya menggunakan strategi engagement menjadi containment. Hal ini menyebabkan adanya perubahan seperti timbulnya pernyataan Donald Trump yang menginginkan peninjauan kembali One China Policy dan peningkatan kerja sama antara Amerika Serikat dan Taiwan. Ini semua dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan keamanan nasional, juga oleh faktor ideologis dan politik internal Amerika Serikat, yang memandang adanya peningkatan kekuatan militer dan ekonomi Cina merupakan suatu ancaman bagi status quo Amerika Serikat.*

*Kata Kunci: One China Policy, Donald Trump, Cina, Taiwan, Politik Luar Negeri.*

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the changes that have occurred in the United States' approach to the One China Policy, which initially used an engagement strategy to become a containment. The One China Policy has been the main pillar in the formation of cooperation between the United States and China since the 1970s. However, this policy experienced a shift in approach after Donald Trump became President of the United States. This raises a research gap about why there is a change in approach in the Donald Trump era. This research uses an explanatory method with a qualitative approach to explore the factors that influence these changes and see the form of change. The author also uses the theory of neoclassical realism as a theory to analyze the factors that cause change. Data was obtained through analysis of official documents, policy statements related to the change in approach, and also from related news portals. The results showed that there was a change in the strategy of the United States' approach from using an engagement strategy to containment. This led to changes such as the emergence of Donald Trump's statement that he wanted to review the One China Policy and increase cooperation between the United States and*

*Taiwan. This is all influenced by economic and national security factors, as well as by the ideological and internal political factors of the United States, which views China's increasing military and economic power as a threat to the US status quo.*

*Keywords: One China Policy, Donald Trump, China, Taiwan, Foreign Policy.*

## **Pendahuluan**

Kebijakan *One China Policy* gencar diberlakukan oleh Mao Zedong sejak berakhirnya perang saudara Cina. Dimana Partai Komunis Tiongkok (PKT) menjadi pemenang dan membangun pemerintahan di daratan Cina dengan nama Pemerintah Republik Cina atau *the People's Republic of China*. Kebijakan "*One China Policy*" merupakan landasan Cina dalam menegaskan bahwa Taiwan bukanlah negara berdaulat melainkan tetap menjadi bagian dari salah satu provinsi di Cina. Tidak hanya berlaku di Cina, kebijakan ini juga berlaku di banyak negara dan organisasi internasional, akhirnya berdampak dengan pengakuan kedaulatan Taiwan dan hubungan diplomatik Taiwan dengan negara-negara lain

Pada Februari 1972, Amerika secara resmi mengakui pemerintahan di Beijing merupakan pemerintahan yang sah dan satu-satunya di Cina dan tidak mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat atau terpisah dari Cina. Amerika Serikat sendiri sebagai negara yang mengakui kebijakan *One China Policy*, tetapi juga tetap secara aktif bekerja sama dan memberikan bantuan militer dan pertahanan kepada Taiwan agar bisa melawan tekanan dari Cina. Penerapan sikap *ambiguity* oleh Amerika Serikat dilakukan dengan tujuan agar hubungan antara Taiwan dan Cina tetap berjalan walaupun kedua negara tersebut dalam keadaan berkonflik satu sama lain. Konsep kebijakan *strategic ambiguity* berarti bahwa kebijakan yang secara sengaja menimbulkan keraguan dalam proses pengambilan keputusan baik Cina maupun Taiwan. Dengan demikian, Amerika Serikat tidak memiliki arah kebijakan yang pasti untuk mendukung atau melawan Taiwan dan Cina.

Pendekatan antara Amerika Serikat dan Cina pasca perang dingin, mulai dari George H.W. Bush hingga Barack Obama, berupaya untuk mempertahankan hubungan positif dengan Cina melalui strategi keterlibatan dan penanggulangan (Nguyen, 2017). Bila dilihat dari kebijakan Amerika Serikat pada saat menjabat, dari era Richard Nixon sampai dengan Barack Obama, setiap Presiden Amerika mengambil pendekatan netral dengan tetap mendukung Cina tetapi juga tetap memberikan bantuan kepada Taiwan dan berfokus kepada penyelesaian konflik kepada kedua negara. Amerika Serikat menggunakan pendekatan *engagement* terhadap Cina dan dijalankan sejak era presiden Nixon sampai dengan era kepemimpinan Obama (Hoem, 2020). Tetapi pendekatan ini dianggap gagal untuk dalam mencapai tujuan Amerika Serikat, yaitu membuat Cina menjadi mitra yang dapat diawasi oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu memasuki era Trump, pendekatan ini resmi berakhir dan beralih ke persaingan antara Amerika Serikat dan Cina.

Ambisi Trump dan kekhawatiran yang ditimbulkan oleh rivalitas antara Cina dan Amerika inilah yang menyebabkan muncul ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat pada era Trump, banyak pendekatan dan kebijakan *offensive* yang Trump keluarkan kepada Cina. Trump menggunakan pendekatan yang cenderung keras di berbagai bidang terkait Cina dan salah satunya terkait dengan *One China Policy*. Terdapat perubahan besar di era pemerintahan Trump dibandingkan dengan pemerintahan presiden Amerika Serikat sebelumnya, hal ini membuat Amerika Serikat bersikap lebih tegas terhadap Cina di berbagai bidang seperti keamanan nasional, hak asasi manusia, Taiwan, dan wilayah Indo-Pasifik, perubahan ini dianggap sebagai "*turning point*" dalam hubungan Amerika Serikat dan Cina.

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada penjelasan dan analisis mengenai perubahan-perubahan pendekatan Amerika Serikat terhadap prinsip *One China Policy* yang telah lama diterapkan

oleh Amerika Serikat di era kepemimpinan Donald Trump. Amerika Serikat telah lama mengakui prinsip satu Cina, dimana Beijing merupakan pemerintahan resmi Cina, dan Taiwan merupakan bagian dari Cina dan bukan negara merdeka. Tetapi pada era kepemimpinan Presiden Donald Trump terjadi perubahan maupun pendekatan Amerika Serikat terhadap Cina dan juga prinsip *One China Policy* dan hal ini yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif berbasis pendekatan kualitatif. Metode penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjawab pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana” dengan memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang fenomena perubahan pendekatan Amerika Serikat terhadap *One China Policy* di era Presiden Donald Trump. Penelitian eksplanatif berusaha mencari penyebab dan alasan perubahan pendekatan tersebut terjadi, serta memberikan bukti untuk mendukung atau menyangkal penjelasan dan prediksi. Sedangkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari fenomena yang diamati, dan data tersebut dikumpulkan menjadi sebuah jawaban dari permasalahan yang penulis teliti.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik pengumpulan data studi pustaka dengan mempelajari dokumen dan literatur terkait dengan pendekatan Amerika Serikat terhadap *One China Policy* di era Trump kepentingan nasional Amerika Serikat terkait dengan hubungan kerja sama Amerika Serikat dan Cina, gaya politik luar negeri yang diterapkan Donald Trump dalam berhubungan dengan Cina khususnya terhadap prinsip *One China Policy*. Untuk sumber data penulis menggunakan sumber-sumber data sekunder yang dikumpulkan menggunakan studi pustaka sebagai sumber data. Dokumen menurut Alan Bryman dapat berbentuk seperti dokumen resmi negara, organisasi, laporan, jurnal, publikasi, dan juga sumber referensi online yang dipercaya dan valid.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **a. Gambaran Umum Pendekatan Amerika Serikat Terhadap *One China Policy***

Sebelum era Donald Trump, pendekatan Amerika Serikat terhadap *One China Policy* telah konsisten dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan sejak normalisasi hubungan dengan Cina pada tahun 1979. *One China Policy* adalah kebijakan yang mengakui hanya satu pemerintah Cina, dengan Amerika Serikat mengakui Beijing sebagai satu-satunya pemerintahan Cina yang sah, dan mengakui posisi Cina bahwa Taiwan adalah bagian dari Cina, meskipun tidak mendukung klaim kedaulatan Cina atas Taiwan. Kebijakan ini dirumuskan melalui tiga komunikasi bersama antara Amerika Serikat dan Cina yang ditandatangani pada tahun 1972, 1979, dan 1982. Pada dokumen-dokumen ini, Amerika Serikat berjanji untuk mengurangi penjualan senjata ke Taiwan dan mengakui posisi Cina mengenai Taiwan, meskipun tetap mempertahankan hubungan tidak resmi dan penjualan senjata defensif kepada Taiwan di bawah *Taiwan Relations Act* tahun 1979

Pada kebijakan ini, presiden-presiden Amerika Serikat sebelumnya, termasuk George W. Bush dan Barack Obama, berhati-hati untuk tidak memprovokasi Cina dengan langkah-langkah yang dapat dilihat sebagai dukungan langsung terhadap kemerdekaan Taiwan. Mereka mempertahankan hubungan komersial dan pertahanan yang kuat dengan Taiwan tanpa secara terbuka menantang klaim kedaulatan Cina. Contohnya, dalam era Obama, meskipun ada peningkatan penjualan senjata ke Taiwan, Obama tetap memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melampaui batas yang akan memicu konflik langsung dengan Beijing (Hoem, 2020).

Bila dilihat dari kebijakan Amerika Serikat pada saat menjabat, dari era Richard Nixon sampai dengan Barack Obama, setiap Presiden Amerika mengambil pendekatan netral dengan tetap mendukung Cina tetapi juga tetap memberikan bantuan kepada Taiwan dan berfokus kepada penyelesaian konflik kepada kedua negara. Amerika Serikat menggunakan pendekatan *engagement* terhadap Cina dan dijalankan sejak era presiden Nixon sampai dengan era kepemimpinan Obama. Tetapi pendekatan ini dianggap gagal untuk dalam mencapai tujuan Amerika Serikat, yaitu membuat Cina menjadi mitra yang dapat diawasi oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu memasuki era Trump, pendekatan ini resmi berakhir dan beralih ke persaingan antara Amerika Serikat dan Cina .

Pada saat Donald Trump menjabat, Trump menggunakan pendekatan yang cenderung keras di berbagai bidang terkait Cina dan salah satunya terkait dengan *One China Policy*. Terdapat perubahan besar di era pemerintahan Trump dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, hal ini membuat Amerika Serikat bersikap lebih tegas terhadap Cina di berbagai bidang seperti keamanan nasional, hak asasi manusia, Taiwan, dan wilayah Indo-Pasifik, perubahan ini dianggap sebagai “*turning point*” dalam hubungan Amerika Serikat dan Cina (Kubo, 2019).

Donald Trump mengubah strategi pendekatan dari “*engagement*” menjadi “*containment*” dikarenakan adanya pandangan Donald Trump yang menyakini bahwa strategi sebelumnya sudah tidak bisa menahan dominasi Cina dan bisa mengancam polaritas Amerika Serikat (Hoem, 2020). Donald Trump memiliki pandangan yang berbeda terhadap pendekatan *engagement* bila dibandingkan dengan para pendahulunya. Trump memandang pendekatan ini telah gagal mencapai tujuan awalnya, yaitu untuk membatasi pengaruh Cina, alih-alih menjadi lebih liberal atau menghormati aturan internasional, Cina justru semakin otoriter dan juga semakin menunjukkan dominasinya di kawasan Asia. Perubahan pandangan Donald Trump ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang akhirnya membuat Trump menciptakan pendekatan baru, pendekatan *containment*. Pendekatan baru ini juga menjadi strategi untuk menggantikan pendekatan *engagement* yang tidak lagi memadai dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kebangkitan Cina.

## **b. Perubahan Pendekatan Amerika Serikat Terhadap *One China Policy* di era Presiden Donald Trump**

Selama masa kepresidenan Donald Trump, pendekatan Amerika Serikat terhadap *One China Policy* mengalami perubahan signifikan dan mengindikasikan pergeseran strategis dalam hubungan dengan Taiwan dan Cina. Kebijakan yang telah lama dipegang ini, yang mengakui Beijing sebagai satu-satunya pemerintah yang sah tetapi tetap mempertahankan hubungan informal dengan Taiwan, mulai ditinjau kembali. Di bawah pemerintahan Trump, Amerika Serikat mengambil sejumlah langkah yang memperkuat dukungan dengan Taiwan, termasuk penjualan senjata dalam jumlah besar, pengesahan Undang - Undang Perjalanan Taiwan, dan peningkatan partisipasi diplomatik. Langkah-langkah ini tidak hanya menunjukkan komitmen Amerika Serikat yang lebih kuat terhadap keamanan Taiwan, tetapi juga menandai perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang lebih konfrontatif terhadap Cina. Perubahan ini mencerminkan pendekatan baru yang lebih tegas dan terbuka untuk mendukung Taiwan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Cina.

### **1. Pernyataan Peninjauan Kembali Kebijakan *One China Policy*: Dampak Kritik Terhadap Donald Trump Pasca Penerimaan Telepon dari Tsai Ing-Wen.**

Pada masa pemerintahan Donald Trump, “*One China Policy*” Amerika Serikat mengalami peninjauan ulang, yang menandakan perubahan dalam pendekatan tradisional yang telah berlangsung selama beberapa dekade. “*One China Policy*” tradisional yang diadopsi sejak

1979 mengakui Pemerintah Beijing sebagai satu-satunya pemerintah sah Cina, sembari mempertahankan hubungan informal namun substansial dengan Taiwan.

Salah satu indikasi pertama dari perubahan ini adalah panggilan telepon dari Presiden Taiwan. Tsai Ing-wen kepada Trump pada bulan Desember 2016. Ini adalah kontak langsung pertama antara presiden Amerika Serikat dan pemimpin Taiwan sejak hubungan diplomatik secara resmi diputuskan pada tahun 1979. Panggilan telepon ini mengejutkan banyak pihak dan memicu reaksi keras dari Beijing, yang menandakan dimulainya perubahan pendekatan Amerika Serikat terhadap Taiwan di bawah kepemimpinan Trump.

Hal ini membuat Trump akhirnya membuka suara terkait interaksinya dengan Tsai Ing Wen. Pada acara “Fox News Sunday” Donald Trump mengatakan:

*“I fully understand the ‘one China’ policy, but I don’t know why we have to be bound by a ‘one China’ policy unless we make a deal with China having to do with other things, including trade,”* (Aljazeera, 2016)

Hal ini juga diartikan bahwa Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak perlu berpegang teguh pada prinsip *One China Policy* yang mengatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari satu Cina, dan juga mempertanyakan prinsip yang telah dipegang teguh oleh Amerika Serikat itu selama empat dekade (Aljazeera, 2016). Sedangkan dalam menanggapi kontak langsung Donald Trump dan Tsai Ing Wen tentang pembicaraannya di telepon, Trump mengatakan bahwa dia merasa Cina tidak seharusnya mengatur tentang hal personalnya, dikarenakan itulah adalah panggilan telepon untuknya. Jawaban dari Trump tersebut mengindikasikan bahwa menurutnya dalam permasalahan ini bukanlah urusan Beijing untuk memutuskan ia bisa menerima telepon tersebut atau tidak (BBC, 2016b).

*Global Times*, sebuah tabloid berpengaruh yang diterbitkan oleh surat kabar resmi Partai Komunis Cina, *People's Daily*, mengatakan dalam sebuah editorial bahwa Trump “naif seperti anak kecil dalam hal diplomasi” dan kebijakan “*One China*” “tidak dapat dibeli atau dijual”. “Kami akan membuktikan bahwa selama ini Amerika Serikat tidak dapat mendominasi Selat Taiwan dan keinginan Trump untuk menjual kebijakan 'satu China' untuk kepentingan komersial adalah dorongan kekanak-kanakan,” dikutip dari surat kabar tersebut (Aljazeera, 2016).

Selain insiden ini, ada juga insiden lainnya yang memancing sikap keras Cina terhadap Amerika Serikat. Kunjungan Tsai Ing Wen di Houston pada 13 Januari 2017, memicu kemarahan dari Cina. Hal ini menimbulkan peringatan kembali melalui tabloid *Global Times*, memperingatkan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump bahwa Cina akan “membalas dendam” jika dia mengingkari kebijakan satu Cina, hanya beberapa jam setelah presiden Taiwan singgah di Houston.

Cina telah meminta Amerika Serikat untuk tidak mengizinkan Tsai masuk atau mengadakan pertemuan resmi dengan pemerintah di bawah kebijakan satu Cina. Beijing menganggap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai provinsi pemberontak yang tidak memenuhi syarat untuk hubungan antar negara. Masalah ini merupakan masalah yang sensitif bagi Cina (Goh, 2017). Menanggapi hal tersebut, senator Ted Cruz mengatakan bahwa beberapa anggota Kongres telah menerima surat dari konsulat Cina yang meminta mereka untuk tidak bertemu dengan Tsai selama persinggahannya. Cruz mengatakan bahwa Cina perlu memahami bahwa di Amerika Serikat, Kongres membuat keputusan tentang pertemuan dengan pengunjung untuk diri kami sendiri, dan juga ia menambahkan bahwa ini bukan tentang Cina,

tetapi ini tentang hubungan Amerika Serikat dan Taiwan, sekutu yang secara hukum harus kami bela (Goh, 2017).

## 2. Dampak peningkatan Kerjasama Sama Amerika Serikat dan Taiwan dalam Bidang Militer dan Diplomati terhadap *One China Policy*

Di era pemerintahan Donald Trump, kerja sama antara Amerika Serikat dan Taiwan telah meningkat secara signifikan, yang mencerminkan perubahan pendekatan terhadap *One China Policy*. Pemerintahan Trump mengambil berbagai langkah untuk memperkuat hubungan dengan Taiwan, mulai dari peningkatan penjualan senjata, dukungan diplomatik yang lebih kuat, hingga mendorong partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional.

Penjualan senjata yang mencakup pesawat tempur F-16 dan sistem pertahanan udara merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat kemampuan pertahanan Taiwan terhadap ancaman Cina (Maizland, 2019). Selain itu, penandatanganan undang-undang Perjalanan Taiwan pada tahun 2018 memungkinkan kunjungan oleh pejabat tinggi antara kedua negara, meningkatkan tingkat interaksi dan dukungan resmi Amerika Serikat untuk Taiwan. Peningkatan kerja sama ini tidak hanya memperkuat posisi Taiwan di panggung internasional (VOA, 2020), tetapi juga menegaskan komitmen Amerika Serikat untuk mendukung negara-negara demokrasi dan sekutu di kawasan ini di tengah meningkatnya ketegangan dengan Cina.

Peningkatan secara drastis kerja sama Taiwan dan Amerika Serikat secara tidak langsung membuat Cina merasa terancam. Hal ini dikarenakan kerja sama yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Taiwan ini bertujuan untuk memperkuat Taiwan dari serangan dan Tekanan Cina. Oleh karena itu, meningkatnya hubungan kerja sama ini dapat diartikan oleh Cina sebagai pelanggaran dari prinsip *One China Policy* oleh Amerika Serikat. *One China Policy* menyatakan bahwa hanya terdapat satu Cina yang sah, dan Taiwan merupakan bagian Cina. Peningkatan kerja sama Amerika Serikat dan Taiwan bisa berdampak dengan melemahnya penerapan prinsip *One China Policy* di dunia internasional. Hal ini bisa memberikan sinyal bahwa Amerika Serikat, yang meskipun secara resmi mengakui *One China Policy*, mendukung kedaulatan Taiwan melalui peningkatan kerja sama yang dilakukan. Memberikan kekhawatiran pada Cina bahwa negara-negara lain bisa saja terpengaruh dan ikut mempertimbangkan hubungan lebih dengan Taiwan.

### A. *Taiwan Travel Act*

*Taiwan Travel Act* merupakan undang-undang Kongres-115 Amerika Serikat yang dibuat dengan tujuan untuk memperkuat hubungan kedua negara antara Amerika Serikat dan Taiwan. Undang ini berisi tentang aturan yang memperbolehkan kunjungan dari semua tingkatan pejabat pemerintah Amerika Serikat dengan pejabat Taiwan. Pada undang-undang ini juga diperbolehkan bagi pejabat Taiwan tingkat tinggi untuk berkunjung dan menemui pejabat Amerika Serikat, termasuk pejabat dari Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, dan lembaga pemerintah lainnya (115<sup>th</sup> Congress, 2018).

Dengan adanya undang-undang ini memberikan legitimasi tambahan bagi hubungan antara Amerika Serikat dan Taiwan, meskipun dalam konteks tidak resmi. Langkah ini meningkatkan frekuensi dan tingkat interaksi antara pejabat Amerika Serikat dan Taiwan, yang sebelumnya dibatasi. Sebelum adanya undang-undang ini, kunjungan resmi ke Taiwan oleh Amerika Serikat sangat jarang terjadi dikarenakan adanya prinsip

*One China Policy*. Dengan mengakui kebijakan satu Cina ini membuat hubungan diplomatik formal antara Amerika Serikat dan Taiwan dihentikan, dan interaksi antara pejabat tinggi kedua negara dibatasi (Martina & Zengerle, 2018).

*Taiwan Travel Act* secara langsung mencoreng prinsip *One China Policy* yang dipegang oleh Amerika Serikat. Dengan adanya izin kunjungan bagi para pejabat tingkat tinggi Amerika Serikat dan Taiwan untuk saling mengunjungi, memberikan kesan bahwa Amerika Serikat mengakui Taiwan sebagai entitas terpisah. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip *One China Policy*. Oleh karena itu undang-undang ini dapat melemahkan posisi diplomatik Cina yang menuntut agar negara-negara lain untuk tidak memiliki hubungan resmi dengan Taiwan.

## B. Peningkatan Penjualan Senjata

Taiwan bergantung pada dukungan militer Amerika Serikat untuk mempertahankan diri dari ancaman Cina, yang beranggapan bahwa Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri. Oleh karena itu penjualan senjata oleh Amerika Serikat kepada Taiwan merupakan isu sensitif dalam hubungan Amerika Serikat-Cina. Amerika Serikat yang secara terus menerus menyokong pasokan persenjataan kepada Taiwan secara tidak langsung semakin mempersulit Cina untuk mencapai kepentingan nasionalnya, yaitu menyatukan kembali Taiwan.

Pada era pemerintahan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat mengalami pelonjakan penjualan senjata. Langkah ini merupakan suatu upaya dari strategi kebijakan luar negeri yang lebih tegas terhadap Cina untuk memperkuat kemampuan pertahanan Taiwan di tengah meningkatnya tekanan dari Beijing. Lonjakan penjualan senjata ini juga mencerminkan sikap Amerika Serikat yang semakin condong mendukung pertahanan Taiwan dan juga sebagai strategi untuk menekan kebangkitan militer Cina.

Selama masa pemerintahan presiden sebelumnya, Presiden Barack Obama, penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan lebih sedikit dibandingkan masa Donald Trump. Selain itu juga terjadi pembatasan penjualan senjata, karena pemerintahan Obama lebih bersikap hati-hati dalam melakukan transaksi penjualan senjata kepada Taiwan agar tidak memprovokasi pihak Cina. Selama dua periode masa pemerintahannya, total seluruh penjualan senjata kepada Taiwan mencapai sekitar 14\$ miliar.

Sebaliknya, pemerintahan Donald Trump mengambil pendekatan yang lebih agresif dalam mendukung Taiwan. Penjualan senjata selama masa jabatan Trump mencapai lebih dari \$18 miliar, termasuk penjualan besar seperti tank M1A2T Abrams dan jet tempur F-16V yang merupakan salah satu transaksi terbesar yang pernah dilakukan antara Amerika Serikat dan Taiwan. Selain itu juga terdapat senjata lainnya mencakup rudal udara-ke-darat Harpoon, drone canggih, serta tank Abrams (Girard, 2020). Pemerintahan Trump juga mengadopsi kebijakan yang lebih terbuka dan sering mengumumkan penjualan senjata dalam paket yang lebih besar dan lebih sering dibandingkan dengan era Obama. Hal ini mencerminkan komitmen Trump untuk memperkuat kemampuan pertahanan Taiwan sebagai bagian dari strateginya untuk melawan pengaruh Cina di kawasan ini.

Peningkatan penjualan secara drastis baik dalam segi frekuensi maupun nilai, dan jenis senjata menandakan adanya perbedaan yang signifikan pada era Presiden Obama

dan Donald Trump. Trump menggunakan Taiwan sebagai bagian dari strategi konfrontasi yang lebih besar untuk Cina. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melawan pengaruh Cina di kawasan Asia Timur dan meningkatkan ketegangan pada kawasan tersebut.

#### C. Dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan di WHO

Selama masa kepresidenan Donald Trump, Amerika Serikat telah memperkuat dukungannya terhadap Taiwan di organisasi internasional. Hal ini mencerminkan strategi Amerika Serikat untuk meningkatkan posisi Taiwan di panggung global dan melawan dominasi Cina. Dukungan ini dimanifestasikan melalui berbagai tindakan diplomatik dan kebijakan, termasuk mendorong partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia *World Health Organization* (WHO). Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa Taiwan memiliki suara dalam isu-isu global yang penting dan dapat berkontribusi secara efektif kepada komunitas internasional. Langkah ini juga menegaskan komitmen Amerika Serikat untuk mempertahankan status quo di Selat Taiwan dan mendukung demokrasi Taiwan di tengah meningkatnya tekanan dari Beijing.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan Amerika Serikat adalah mendukung Taiwan untuk menjadi pengamat di *World Health Assembly* (WHA), badan pengambil keputusan WHO (VOA, 2020). Pada tahun 2020, Amerika Serikat bersama dengan beberapa negara lain mengusulkan agar Taiwan diizinkan untuk berpartisipasi sebagai pengamat di WHA (Taiwan Today, 2019). Meskipun upaya ini ditolak karena tekanan dari Cina, Amerika Serikat tetap gigih mendukung keterlibatan Taiwan.

Cina memberikan reaksi yang sangat keras terhadap dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan di organisasi internasional bersifat negatif dan keras. Cina secara konsisten memprotes langkah-langkah yang mendukung partisipasi Taiwan dalam badan-badan internasional. Sebagai contoh, Cina menggunakan Resolusi Majelis Umum PBB 2758, yang mengakui Republik Rakyat Cina (RRT) sebagai satu-satunya perwakilan sah Cina di PBB dan mengeluarkan Taiwan dari PBB pada tahun 1971 (UN General Assembly, 1971), untuk memblokir partisipasi Taiwan di organisasi internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

#### c. Analisa Faktor Pendorong Perubahan Pendekatan Amerika Serikat Terhadap One China Policy di Era Presiden Donald Trump

Sejak awal terpilih dan menjabatnya Donald Trump, terdapat perubahan signifikan yang terjadi pada pendekatan yang digunakan oleh Amerika Serikat terhadap kebijakan *One China Policy*. Amerika Serikat dan Cina menjadikan *One China Policy* sebagai landasan hubungan diplomatik antara kedua negara sejak tahun 1979 (Wabiser, 2015). Tetapi kebijakan ini mulai dipertanyakan dan banyak muncul dinamika baru di saat Donald Trump menjalankan pemerintahannya. Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump, memperlihatkan pergeseran kebijakan luar negeri yang lebih agresif dan kontroversial (Nguyen, 2017). Pergeseran ini dapat dilihat dengan muncul retorika nasionalis, meningkatnya persaingan strategis antara Cina dan Amerika Serikat, dinamika kekuatan global, dan juga upaya Trump untuk memperkuat posisi strategis Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik (Lestari & Kusumah, 2023).

##### 1. Faktor Sistemik

Faktor sistemik merupakan faktor yang timbul dikarenakan adanya tekanan dan juga dinamika yang berasal dari struktur internasional dan dapat mempengaruhi perilaku negara dan kebijakan luar negeri suatu negara. Faktor ini sendiri mempunyai peran yang sangat penting untuk menjelaskan perilaku dan kebijakan luar negeri suatu negara. Terdapat dua faktor sistemik yang mempengaruhi perubahan pendekatan Amerika Serikat terhadap *One China Policy*, salah satunya yaitu adanya ancaman dari peningkatan kekuatan relatif Cina.

Kemampuan Cina dalam mengembangkan ekonomi dan militernya secara pesat menarik banyak perhatian dari aktor-aktor internasional lainnya. Meningkatnya kemampuan ekonomi dan militer di Cina menimbulkan banyak perspektif dari negara lain. Ada negara yang melihat hal tersebut sebagai peluang dan ada juga yang melihatnya sebagai ancaman (Pradana, 2023). Amerika Serikat merupakan negara yang melihat dua perspektif tersebut. Trump mulai melihat peningkatan Cina sebagai ancaman bagi Amerika Serikat. Dengan adanya kebangkitan Cina yang semakin besar Trump percaya hal itu akan mengancam kekuatan status-quo Amerika Serikat. Kebijakan "*America First*" milik Trump berisi salah satu poin dimana dia ingin memperkuat dan memperluas dominasi Amerika Serikat, hal ini yang membuat Trump memandang dengan mempertahankan kebijakan *engagement* tidak akan menguntungkan bagi kepentingan nasionalnya.

Kebangkitan Cina memiliki potensi menjadi rival baru bagi Amerika Serikat, serta gap yang ditunjukkan dari aspek ekonomi dan militer antara Amerika Serikat dan Cina yang semakin mengecil menjadi salah satu faktor pendorong bagi Trump untuk melakukan perubahan kebijakan luar negeri menuju arah *containment* (Hoem, 2020) dan perubahan arah kebijakan ini pasti akan mempengaruhi pendekatan Amerika Serikat terhadap *One China Policy* di era Presiden Donald Trump. Hal itu dikarenakan dengan sistem internasional yang berbentuk anarki, dimana tidak adanya pemerintahan atau aturan yang dapat membatasi dan mengikat negara. Oleh karena itu dengan sistem anarki membuat negara-negara berusaha untuk membangun kapabilitas dan *power* dengan tujuan menjadi yang terkuat. Negara-negara dengan kapabilitas dan *power* yang besar inilah yang akan cenderung menjadi polar-polar dan menarik negara lainnya untuk bergabung ke dalam polaritas tersebut (Waltz, 1979). Donald Trump melihat peningkatan kekuatan relatif Cina ini sebagai sesuatu yang mengancam status quo Amerika Serikat dan memunculkan rasa rivalitas antara kedua negara, dan akhirnya menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan pendekatan.

Selain dari adanya ancaman yang timbul karena meningkatnya kekuatan relatif Cina, terdapat satu faktor lagi yang mempengaruhi perubahan pendekatan, yaitu tekanan internasional dari negara aliansi Amerika Serikat di Kawasan Asia, Jepang. Tekanan internasional merupakan dorongan atau pengaruh yang datang dari luar negeri, tekanan ini bersifat memaksa dan mendorong suatu negara untuk mengubah suatu keputusan baik itu kebijakan luar negeri ataupun perilaku internasional. Tekanan internasional ini dapat datang dari aktor-aktor internasional seperti organisasi internasional, norma dan hukum internasional, aliansi, dan negara lain. Bentuk dari tekanan ini bisa berupa tekanan diplomatik, ekonomi, militer, atau bahkan moral. Pada kasus ini Amerika Serikat mendapatkan tekanan internasional dari negara aliansi di Kawasan Asia. Negara-negara aliansi Amerika Serikat di Kawasan Asia mengalami konflik dengan Cina dikarenakan adanya agresivitas Cina dalam melakukan kegiatan ekspansi wilayah teritorialnya (Haetami, 2019). Jepang merupakan negara aliansi Amerika Serikat yang terdampak oleh ambisi Cina ini.

*High-Speed Railway (HSR)* adalah salah satu proyek yang dipromosikan oleh BRI. Proyek HSR Cina sendiri merupakan proyek infrastruktur untuk pembangunan jaringan kereta api domestik berkecepatan tinggi dan juga sebagai proyek investasi bagi negara-negara lain. Suksesnya Cina dalam mengembangkan HSR memicu timbulnya rasa kompetitif Jepang sebagai negara pertama yang meluncurkan teknologi kereta cepat (*Shinkansen*). Ditambah dengan adanya motivasi Cina dalam mengembangkan proyek HSR ini adalah menjadi sarana agar bisa meningkatkan pengaruh politik Cina kepada negara-negara mitra yang bekerja sama dengan tujuan agar Cina memiliki *power* dan dominasi sebagai *leader* kawasan (Ker, 2017). Ditambah dengan banyaknya negara Asia Tenggara dan Korea Selatan yang lebih condong untuk bekerja sama dengan Cina pada proyek HSR ini daripada dengan *Shinkansen* Jepang.

Hal ini membuat Jepang merasa perlu mengambil tindakan, Perdana Menteri Jepang pada saat itu Shinzo Abe mengumumkan adanya bantuan senilai \$110 Miliar untuk Kerja sama Pembangunan infrastruktur dengan mengedepankan kualitas di Asia sebagai Upaya Jepang untuk mengimbangi perkembangan pengaruh Cina dalam Pembangunan Infrastruktur di Asia. Inisiatif ini disebut jua dengan *Partnership for Quality Infrastructure (PQI)* (Kameda, 2015). Dengan adanya inisiatif ini Jepang memfokuskan pada kualitas yang merupakan titik lemah dari Cina, karena secara teknologi Jepang memiliki teknologi yang lebih maju apabila dibandingkan dengan Teknologi Jepang.

Tidak hanya itu, dikarenakan semakin besarnya tekanan yang dirasakan oleh Jepang dari perkembangan Cina ini membuat Shinzo Abe melibatkan Amerika Serikat ke dalam perihal ini. Pada era Donald Trump, Shinzo Abe mempunyai peran penting dalam melobi Amerika Serikat agar bisa memberikan dukungan lebih untuk Taiwan sebagai bagian dari strategi Jepang untuk melawan Pengaruh Cina di Kawasan Indo-Pasifik. Abe, melalui berbagai saluran diplomatik dan pernyataan publik, menekankan pentingnya strategis Taiwan bagi keamanan Jepang. Dia berpendapat bahwa setiap urgensi yang melibatkan Taiwan akan secara langsung berdampak pada Jepang dan aliansi antara Amerika Serikat-Jepang (Chansoria, 2022).

## 2. Faktor Kognitif

Faktor Kognitif dalam teori NCR merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi dan keputusan dari pemimpin politik ataupun aktor negara dalam memberikan respon bagaimana suatu negara harus bertindak. Faktor ini menganalisis bagaimana pemimpin suatu negara melihat dan memahami situasi internasional dan bagaimana ia dapat mengambil keputusan yang berupa kebijakan luar negeri negara tersebut. Oleh karena itu dalam faktor ini latar belakang, sifat kepribadian, *leadership type* para pemimpin menjadi faktor yang penting untuk dianalisis. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan bagaimana faktor idiosinkratik Donald Trump dapat mempengaruhi perubahan pendekatan Amerika Serikat terhadap *One China Policy* saat dia menjabat.

Faktor idiosinkratik dalam pembuatan kebijakan adalah faktor psikologis yang ada dalam diri pembuat kebijakan dan berasal dari dalam diri mereka sendiri. Faktor-faktor ini mempengaruhi cara mereka berpikir, cara mereka melihat, dan apa yang mereka lihat saat membuat keputusan. Faktor-faktor yang penulis akan bahas pada bagian ini adalah kepribadian politik, gaya kepemimpinan (Anugerah, 2016), dan gaya pembuatan keputusan Trump. Donald

Trump sebagai presiden dari negara *super power* adalah hal yang wajar untuk menerima banyak perhatian dari masyarakat internasional. Banyak orang yang berekspektasi Trump akan bertindak dan berperilaku saat pengambilan keputusan sesuai dengan standar tertentu. Namun, Trump menunjukkan hal yang berkebalikan, masyarakat menilai Trump memiliki karakteristik yang arogan dan juga narsistik.

Donald Trump mencalonkan dirinya menjadi presiden Amerika Serikat sebagai wakil dari Partai Republik. Partai Republik sendiri dikenal oleh sikapnya yang mendukung gerakan-gerakan konservatif. Partai ini juga kerap menerima opini dan pandangan negatif dari Masyarakat. Sifat konservatif Trump jelas sangat berdampak besar terhadap hubungan antara Amerika Serikat dan Cina. Dengan sifat tersebut membuat Trump memilih pendekatan yang berfokus pada proteksionisme, nasionalisme, dan kebijakan luar negeri yang keras. Sifat konservatif Trump tercermin dalam kebijakan luar negerinya yang lebih agresif terhadap Cina. Sikap konservatif Donald Trump sangat mempengaruhi pandangannya terhadap Cina sebagai ancaman bagi Amerika Serikat. Trump, dengan pandangan nasionalisnya, seringkali melihat Cina sebagai pesaing utama dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, militer, dan teknologi. Sikap konservatif Trump mempengaruhi kebijakan luar negerinya yang keras terhadap Cina, Donald Trump melihat Cina sebagai ancaman strategis yang harus dihadapi melalui berbagai cara, mulai dari kebijakan ekonomi hingga pertahanan dan teknologi.

Apabila dilihat dari tipe kepribadiannya, Trump memiliki kepribadian narsistik. Tipe kepribadian narsistik merupakan kepribadian yang memiliki rasa kepercayaan diri yang sangat tinggi (Akbar, 2022). Ini sangat sesuai dengan kepribadian Donald Trump yang dikenal dengan ambisinya yang sangat tinggi untuk kembali memperkuat dominasi Amerika Serikat dengan kebijakan "*America First*". Hal ini dapat dilihat bagaimana saat dia langsung menerapkan pendekatan yang berbeda tanpa mengikuti haluan terdahulu terhadap *One China Policy*. Trump mengganti pendekatan yang tadinya menggunakan pendekatan *engagement* menjadi pendekatan *containment* segera setelah dia menjabat menjadi presiden.

Terdapat tujuh dimensi kepribadian yang relevan dalam analisis kepemimpinan, yaitu keyakinan terhadap kemampuan untuk mengendalikan peristiwa, kebutuhan akan kekuasaan, kompleksitas konseptual, kepercayaan diri, orientasi tugas, rasa tidak percaya, dan bias dalam kelompok (Thiers & Wehner, 2022). Dengan melihat ketujuh dimensi tersebut kita bisa menentukan gaya kepemimpinan seseorang. Oleh karena itu berdasarkan dimensi-dimensi tersebut, bisa kita simpulkan bahwa Donald Trump memiliki gaya kepemimpinan yang berupa *Crusader Expansionist*. Gaya kepemimpinan *Crusader* merupakan tipe pemimpin yang menutup diri dari informasi-informasi terbaru dan juga menantang batasan-batasan politik yang ada. Individu *Crusader Expansionist* merupakan seseorang yang mempunyai keinginan untuk memiliki kontrol yang besar atau *high need for power*, memiliki kemampuan yang rendah untuk menciptakan alternatif dalam pembuatan keputusan, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap negara, dan juga cenderung tidak mementingkan hubungan pertemanan (Masniari, 2018).

Karakteristik kepemimpinan Trump yang *high need power* dapat diartikan sebagai sebuah upaya untuk memberikan kontrol dan dominasi terhadap suatu kelompok dan individu. *High need power* adalah situasi adanya urgensi untuk memberikan influen dan dampak pada orang lain. Biasanya karakteristik kepemimpinan ini berkaitan dengan upaya untuk membangun atau mempertahankan kekuatan seseorang (Masniari, 2018) . Orang yang memiliki gaya

kepemimpinan ini cenderung mempunyai sikap yang akan memusuhi pihak dengan status tinggi. Hal ini dikarenakan munculnya rasa tidak senang terhadap individu ataupun kelompok lain yang dianggap memiliki kekuatan lebih besar. Gaya kepemimpinan inilah yang juga bisa menjelaskan mengapa Donald Trump memilih mengambil pendekatan yang lebih keras terhadap Cina. Hal itu dikarenakan Trump merasa dengan adanya perkembangan Cina dan melihat Cina sebagai ancaman yang bisa menghalangi dominasinya dan Amerika Serikat. Trump tidak menyukai hal tersebut karena pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini memiliki sikap yang merasa lebih superior dan lebih baik dari kelompok lainnya.

Donald Trump memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi. Nasionalisme sendiri bisa didefinisikan sebagai prinsip moral yang mendorong untuk membenarkan suatu tindakan untuk melindungi hak-hak bangsa terhadap lainnya (Barrington, 1997). Salah satu dari karakteristik dari pemerintahan Donald Trump adalah keberpihakannya terhadap moralitas sikap membenaran demi kepentingan Amerika Serikat. Sikap proteksionis ini menunjukkan rasa nasionalisme Trump yang tinggi sebagai cara untuk melindungi Amerika Serikat dari ancaman dari luar.

Faktor idiosinkratis selanjutnya yang dapat kita analisis adalah *decision making style* atau gaya pembuat keputusan dari Donald Trump. Kepribadian politik yang narsistik dan juga gaya kepemimpinan *crusader expansionist*, dapat mempengaruhi *decision-making style* Donald Trump. Bila melihat dari bagaimana Donald Trump menentukan suatu keputusan maka bisa kita katakan dia memiliki *impulsive and intuitive decision-making style*. *Impulsive and intuitive decision-making style* adalah gaya pengambilan keputusan yang ditandai dengan pengambilan keputusan secara cepat berdasarkan firasat, naluri, dan reaksi langsung, bukan melalui analisis sistematis dan pertimbangan yang panjang (Bayram & Aydemir, 2017). Saat Donald Trump mengatakan bahwa dia ingin mengkaji ulang tentang *One China Policy* setelah munculnya kontroversi yang ditimbulkan akibat dari interaksinya antara Tsa Ing Wen melalui telfon, merupakan contoh dari pengambilan keputusan secara impulsif dan intuitif. Hal ini dikarenakan Trump secara cepat memutuskan untuk kembali mengkaji prinsip *One China Policy* yang sejak lama sudah dijalani oleh Amerika Serikat tanpa memikirkan efek dan reaksi dari Cina.

Selain itu juga kepribadian Trump menyebabkan pendekatannya menciptakan ambiguitas tentang komitmen Amerika Serikat terhadap *One China Policy*. Meskipun pengakuan formal atas kebijakan tersebut tidak dibatalkan, tindakan Trump menunjukkan kesediaan untuk menentanginya, terutama ketika kebijakan tersebut menguntungkan kepentingan AS. Pendekatannya bersifat transaksional, menggunakan Taiwan sebagai pengaruh dalam negosiasi Amerika Serikat-Cina yang lebih luas. Hal ini menciptakan ketidakpastian tentang niat Amerika Serikat dan melemahkan konsistensi kebijakan sebelumnya yang telah diandalkan oleh Taiwan dan Cina untuk stabilitas.

### 3. Faktor Domestik

Faktor Domestik dalam teori *neo-classical realism*, memainkan peran penting dalam mempengaruhi bentuk kebijakan luar negeri suatu negara. Faktor domestik adalah faktor-faktor internal dari dalam negara yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan negara. Faktor domestik memberikan landasan penting untuk memahami bagaimana dan mengapa negara bertindak di arena internasional.

Institusi dalam negeri, termasuk sistem politik dan birokrasi pemerintah, mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Struktur kelembagaan menentukan bagaimana kebijakan disusun

dan diimplementasikan. Lembaga-lembaga domestik seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki peran dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan luar negeri. Di negara-negara dengan kekuasaan eksekutif yang kuat, keputusan kebijakan luar negeri cenderung lebih terpusat dan cepat diambil. Sebaliknya, di negara-negara dengan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi atau dengan pengawasan legislatif yang ketat, proses pengambilan keputusan dapat melibatkan lebih banyak aktor dan mungkin memakan waktu lebih lama.

Amerika Serikat sendiri merupakan negara yang menganut konsep *Trias Politica*, dimana kekuasaan negara dibagi menjadi tiga, yaitu Kekuasaan eksekutif (*rule application function*) yang bertugas untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan legislatif (*rule making function*) yang memiliki tugas untuk membentuk dan merancang undang-undang. Dan yang terakhir kekuasaan yudisial (*rule adjudication*) yang bertugas untuk memastikan penegakan hukum atas undang-undang (Sugiman,2020). Lembaga legislatif disebut juga dengan parlemen, di Amerika Serikat sendiri parlemennya disebut dengan *The Congress of the United States of America* (kongres), dan memiliki bentuk bikameral.

Sistem bikameral merupakan sistem pemerintah dua kamar, dimana badan perwakilan rakyat terdiri dari majelis tinggi dan majelis rendah yang membentuk badan parlemen. Menurut konstitusi Amerika Serikat yang dituliskan pada *Article I Section I The Constitution of the United States* dan berisi:

*“All Legislative Power herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of Senate and House of Representatives”*  
(Purnama dkk., 2022).

Itu berarti kongres yang terdiri *Senate* (Majelis Tinggi/*Uper House*) sebagai perwakilan teritorial dan *House of Representative* (Majelis Rendah/*Lower House*) sebagai perwakilan politik, memegang kekuasaan legislatif secara penuh (Purnama dkk., 2022).

Pada masa kepresidenan Trump, banyak dari anggota kongresnya yang menunjukkan dukungan kepada Taiwan. Hal ini ditunjukkan dari berbagai upaya legislatif dan pernyataan publik yang menunjukkan keberpihakan dan komitmen mereka terhadap keamanan dan kesejahteraan Taiwan. Senator Marco Rubio dan Ted Cruz adalah dua tokoh utama yang telah vokal dalam mendukung Taiwan. Rubio, misalnya, memperkenalkan serangkaian undang-undang yang bertujuan untuk memperkuat kemitraan Amerika Serikat-Taiwan, termasuk undang-undang yang mendukung pertukaran militer dan ekonomi antara kedua negara (Rubio, 2020). Senator Cruz, menekankan pentingnya mendukung Taiwan sebagai mitra demokratis di kawasan Indo-Pasifik, menggarisbawahi pentingnya menjaga kebebasan dan stabilitas di wilayah tersebut (Cruz, 2021).

Pada Dewan Perwakilan Rakyat, dukungan untuk Taiwan juga kuat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat seperti Ted Yoho secara aktif mendorong kebijakan yang mendukung Taiwan. Yoho sering mengecam tekanan dan intimidasi Cina terhadap Taiwan, dan mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk mendukung partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional. Sebagai contoh, Yoho adalah pendukung kuat dari *Taiwan Assurance Act*, yang bertujuan untuk memperkuat komitmen Amerika Serikat terhadap pertahanan Taiwan (Liao, 2020).

Selain itu, langkah-langkah legislatif lainnya seperti Undang-Undang Perjalanan Taiwan, yang memungkinkan pejabat tinggi Amerika Serikat untuk mengunjungi Taiwan dan sebaliknya, menunjukkan dukungan yang kuat dari Kongres untuk memperdalam hubungan bilateral ini (Yoseph, 2018). Legislasi ini disahkan dengan dukungan bipartisan yang luas, yang

mencerminkan konsensus di antara para anggota Kongres tentang pentingnya Taiwan sebagai sekutu strategis di Asia. Kongres juga secara konsisten menyetujui penjualan senjata ke Taiwan, termasuk sistem pertahanan udara dan pesawat tempur, untuk memperkuat kemampuan pertahanan Taiwan terhadap potensi agresi dari Cina.

Dukungan dari Kongres ini mencerminkan pentingnya Taiwan dalam strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat, di mana stabilitas dan keamanan kawasan ini dianggap sebagai kepentingan nasional Amerika Serikat. Para anggota Kongres, melalui berbagai tindakan dan pernyataan, telah menunjukkan bahwa mereka melihat Taiwan sebagai mitra penting dalam menghadapi pengaruh Cina yang semakin besar di kawasan ini. Mereka percaya bahwa mendukung Taiwan tidak hanya membantu memperkuat demokrasi di kawasan ini, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas dan keamanan global.

Sikap Pro-Taiwan dari anggota kongres Amerika Serikat ini merupakan salah satu faktor penting yang dapat menjelaskan mengapa pada masa Trump menjabat sebagai presiden, Amerika Serikat sangat menunjukkan keberpihakannya terhadap Taiwan. Selain itu faktor ini juga menjadi alasan mengapa bisa terjadi perubahan pendekatan Amerika Serikat terhadap *One China Policy* di era Presiden Donald Trump.

*Congress* memiliki kekuasaan eksklusif untuk mengusulkan, memperdebatkan, mengubah, dan mengesahkan undang-undang, yang kemudian menjadi undang-undang jika ditandatangani oleh Presiden. Peran ini memberikan *Congress* kemampuan untuk membentuk kebijakan publik di berbagai bidang. Selain itu juga *Congress* mewakili kepentingan warga negara Amerika Serikat. *House of Representative* mewakili konstituen dari distrik-distrik berdasarkan jumlah penduduk, sementara Senat mewakili seluruh negara bagian, memberikan keseimbangan antara negara bagian yang padat penduduknya dan yang jarang penduduknya. Struktur ini memastikan bahwa suara dari semua wilayah dan komunitas didengar oleh pemerintah federal.

*Congress* merupakan pusat dari fungsi pemerintah Amerika Serikat, membuat undang-undang, mengontrol keuangan, dan berfungsi sebagai pengawas cabang-cabang pemerintahan lainnya, memastikan pemerintahan yang demokratis (Longley, 2022). Hal ini menjadikannya lembaga penting untuk keseimbangan kekuasaan dan perwakilan di Amerika Serikat. Oleh karena itu dengan adanya sikap pro-Taiwan dalam *Congress* Trump memberikan dampak yang besar terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Banyak kebijakan dan undang-undang yang diciptakan menunjukkan kecondongannya kepada Taiwan dan hal ini tentunya memancing reaksi keras dari Cina.

## **KESIMPULAN**

Sebelum era Trump, kebijakan pendekatan Amerika Serikat terhadap Cina, yang dimulai di bawah Presiden Richard Nixon dan berlangsung selama pemerintahan Barack Obama, menekankan kerja sama ekonomi, dialog diplomatik, dan keterlibatan konstruktif dengan Cina. Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan Cina ke dalam tatanan internasional berbasis aturan, dengan harapan bahwa keterlibatan semacam itu akan mendorong Cina untuk menjadi lebih terbuka dan berkomitmen terhadap norma-norma global.

Pada tingkat internasional, meningkatnya kekuatan militer dan ekonomi Cina serta kebijakan ekspansifnya di Laut Cina Selatan menciptakan lingkungan yang menuntut respons strategis dari Amerika Serikat. Donald Trump melihat peningkatan tersebut sebagai hal yang dapat mengancam status quo Amerika Serikat. Teori realisme neo-klasik menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan distribusi kekuasaan global. Pada konteks ini, kebijakan Trump untuk mendukung Taiwan secara lebih

kuat dapat dipahami sebagai upaya untuk menyeimbangkan dan menekan kekuatan Cina di wilayah tersebut.

Langkah-langkah spesifik yang diambil oleh pemerintahan Trump, seperti penjualan senjata dalam jumlah besar ke Taiwan, penandatanganan *Taiwan Travel Act*, dan peningkatan dukungan diplomatik untuk partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional, menandai perubahan yang nyata dalam pendekatan AS terhadap *One China Policy*. Tindakan-tindakan tersebut dianggap oleh Cina sebagai pelanggaran terhadap *One China Policy*. Sebelum pemerintahan Donald Trump Cina sangat membatasi interaksi antara Amerika Serikat dan Taiwan, dan menurut Resolusi Majelis Umum PBB 2758, Republik Rakyat Cina (RRC) merupakan satu-satunya perwakilan sah Cina di PBB, oleh karena itu memberikan dukungan terhadap Taiwan di organisasi internasional merupakan sebuah pelanggaran dari *One China Policy*. Hal ini mencerminkan upaya untuk mengurangi dominasi Cina dan memperkuat posisi strategis AS di Indo-Pasifik.

Cina menanggapi perubahan kebijakan ini dengan protes diplomatik dan peningkatan retorika yang agresif, protes diplomatik, dan juga peningkatan aktivitas militer di sekitar Taiwan. Tindakan-tindakan ini mencerminkan kekhawatiran Cina terhadap upaya Amerika Serikat untuk mendukung Taiwan dan melemahkan klaim kedaulatan Cina. Cina menganggap tindakan Amerika Serikat sebagai pelanggaran terhadap *One China Policy* dan ancaman terhadap kedaulatan dan integritas teritorialnya.

Pendekatan *containment* Trump terhadap Cina mencerminkan pergeseran paradigma yang signifikan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dari membina hubungan yang lebih harmonis dan saling menguntungkan dengan Cina, menjadi strategi yang lebih berfokus pada pembatasan pengaruh dan kekuatan Cina di kawasan dan global. Pergeseran ini dipicu oleh kekhawatiran akan meningkatnya kekuatan militer dan ekonomi Cina, serta ancaman yang dirasakan terhadap kepentingan strategis dan keamanan nasional Amerika Serikat.

## Daftar Pustaka

- Adhyaksana, M. Y. (2008). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). *Tesis*, 1–124.
- Arwin, M. U. H. A. (2013). *PERAN INTERPOL INDONESIA DI WILAYAH REGIONAL ASEAN*.
- BPHN. (1979). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi. *J Bone Joint Surg Am*, 36(June), 1–6.  
<http://www.bphn.go.id/data/documents/79u001.pdf>
- BPHN. (2008). Analisis Dan Evaluasi Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) UU No. 1 Tahun 2006). *Bphn*, 1, 20.  
[https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan\\_timbal\\_balik\\_dlm\\_masalah\\_pidana.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf)
- Burke, P. J., & Reitzes, D. C. (1981). The Link Between Identity and Role Performance. *Psychology Quarterly*, 44(2), 83–92.
- Devita, R. (2017). *Kerja Sama Indonesia-Tongkok Dalam Pemulangan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Samadikun Hartono Tahun 2016*.
- Harnisch, S., Frank, C., & Maull, H. W. (2011). Role theory in international relations: Approaches and analyses. *Role Theory in International Relations: Approaches and Analyses*, 1–323.  
<https://doi.org/10.4324/9780203818756>
- ICPO-Interpol. (1965). *International Notices. I*, 821–824.
- ICPO-Interpol. (2000). *Interpol Database*. 1–3.
- ICPO-Interpol. (2019). Interpol's Rules on the Processing of Data. *Interpol Documents, 2011*, 181–207.  
<https://doi.org/10.1201/9780429435034-10>
- ICPO-Interpol. (2021). *Constitution of the ICPO-INTERPOL. 1956*, 1–10.
- ICPO-Interpol. (2022a). *About Red Notices*.  
<https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/Red-Notices>
- ICPO-Interpol. (2022b). *Key Dates*.  
<https://www.interpol.int/Who-we-are/INTERPOL-100/Key-dates>
- ICW. (2011a). *Akhirnya Nunun Tersangka*.  
<https://antikorupsi.org/id/article/akhirnya-nunun-tersangka>
- ICW. (2011b). *Buru Nunun, KPK Kirim Tim ke Thailand*.  
<https://antikorupsi.org/id/article/buru-nunun-kpk-kirim-tim-ke-thailand>
- Ilyas, R. D. (2016). Peranan Interpol Dalam Ekstradisi Tersangka Korupsi (Studi Kasus Penangkapan Tersangka Muhammad Nazaruddin Di Cartagena, Kolombia). *Skripsi Hukum Universitas Hasanuddin*, 1–80.
- Indonesia, C. (2021). *Kronologi BLBI hingga Tagihan Rp110,45 T*.  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210604155336-532-650470/kronologi-blbi-hingga-tagihan-rp11045-t>
- Interpol. (2022). *INTERPOL Safer World Trifold*.
- Iriawan, M. (2004). *Majalah Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK-PTIK Edisi Perdana*.
- Izzulhaq, M. D. (2022). *Upaya Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Kabur Ke Luar Negeri. 12*, 1–13.

- Kholisoh, B. B., & Suswoto. (2022). *EXTRADITION BY THE INDONESIAN NATIONAL POLICE OF PERPETRATORS OF CORRUPTION FROM INDONESIA, BASED ON THE LEGAL PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION (ICPO-INTERPOL)*. 7(1), 1–15.
- KPK. (2015). *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi*. 6(August), 128.
- Liputan6. (2012). *Kisah Nunun dan Kasus Cek Pelawat*.  
<https://www.liputan6.com/news/read/399293/kisah-nunun-dan-kasus-cek-pelawat>
- Manullang, C. M. (2019). *Analisis Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan International Criminal Police Organization Dalam Penangkapan Muhammad Nazaruddin Di Cartagena Kolombia*. x & 9.
- Maritho, M. I. (2020). IMPLEMENTASI KERJASAMA NATIONAL CENTRAL BUREAU-INTERPOL INDONESIA DENGAN NATIONAL CENTRAL BUREAU-INTERPOL AUSTRALIA DALAM EKSTRADISI TERSANGKA KORUPSI STUDI KASUS: ADRIAN KIKI ARIAWAN. *UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional*, 2(1).  
<https://www.slideshare.net/ALBICEE/lembar-observasi-siswa-50178674>
- Rahmana, B. D. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Ekstradisi Adrian Kiki Ariawan Dalam Kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia. *JOM Fakultas Hukum Vol. II No. 1 Februari 2015*, 2(April), 1–15.
- Rembet, Z. (2022). Ekstradisi Sebagai Suatu Upaya Hukum Dalam Penindakan Terhadap Pelaku Kejahatan Menurut Uu No 1 Tahun 1979. *Lex Administratum*, Query date: 2023-03-27 11:41:23.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/41925>
- Robertua, D. (2023). *Transkrip Wawancara NCB-Interpol Indonesia. 2011*, 6–8.
- Rumiyati, R. (2021). The Extradition Agreement Between Indonesia and Australia: Case of Adrian Kiki Iriawan Extradition. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legislation*, 2(1), 1–32.  
<https://doi.org/10.15294/digest.v2i1.48631>
- Schober, J., & States, U. (1984). *Interpol*, *Britannica Online Encyclopedia*. 11–12.
- Transparency International. (2023). *Corruption perceptions*. 16. [www.transparency.org/cpi](http://www.transparency.org/cpi)
- Waryenti, D. (2014). Ekstradisi Dan Beberapa Permasalahannya. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).  
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.64>
- Wicaksono, D. R., Harahap, A. A., Wulan, G. A., & Logahan, J. M. (2020). *Implementasi kerja sama POLRI dan Korean National Police Agency dalam penyerahan pelaku kejahatan transnasional (studi kasus tersangka SP-anggota Muslim Cyber Army) -Abstrak* [Universitas Indonesia].  
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20508583&lokasi=lokal>
- Widoyoko, J. D. (2018). Politik, Patronase dan Pengadaan. *Integritas*, 4(2), 1–23.